

ABSTRAK

PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

(Suatu Kajian terhadap Peran DPD dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Provinsi Jawa Barat)

Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan sedikitnya Rancangan Undang-Undang yang diusulkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). RUU memberikan gambaran tindak lanjut aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPD. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) upaya DPD dalam menyerap aspirasi masyarakat provinsi Jawa Barat; 2) hasil yang di capai DPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat dalam PROLEGNAS; 3) faktor yang mendukung serta menghambat peran DPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat provinsi Jawa Barat dalam PROLEGNAS. Penelitian ini dilaksanakan sebagai upaya mengetahui peran DPD dalam PROLEGNAS melalui kegiatan menyampaikan aspirasi masyarakat. Pendekatan yang digunakan untuk mengungkap permasalahan-permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif, yang ditujukan untuk memahami dan menggambarkan sebuah fenomena, pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat 4 upaya yang dilakukan DPD dalam menyerap aspirasi masyarakat Jawa Barat; 2) hasil yang dicapai DPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Jawa Barat masih belum optimal dan tidak adanya produk hukum yang dihasilkan; dan 3) faktor yang mendukung serta menghambat peran DPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat provinsi Jawa Barat dalam PROLEGNAS, faktor pendukung yakni rakyat dan faktor penghambat yakni keterbatasan wewenang yang dimiliki DPD, kurang adanya peran dari pimpinan DPD, dan posisi DPD menjadi pihak ke-2 dalam legislasi setelah DPR.

Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah, Program Legislasi Nasional, dan kegiatan menyampaikan aspirasi

ABSTRACT

Muhamad Saepul akbar (1406317): THE ROLE OF THE REGIONAL COUNCIL OF REPRESENTATIVE IN NATIONAL LEGISLATION PROGRAM (*a research toward the role of the regional council of representative in conveying the citizen aspiration in West Java Province*)

The background of this research is the less number of the regulation planning (*Rancangan Undang-Undang/RUU*) from the regional council of representative (*DPD*) that passes into National Legislation Program (*Program Legislasi Nasional/PROLEGNAS*). *RUU* depicts further action of the citizen aspiration toward *DPD*. According to that problem, the researcher is interested to investigate the problem. The research itself aims to investigate: 1) the *DPD* effort in absorbing the aspiration of West Java citizen; 2) the outcome that is obtained by *DPD* in conveying the aspiration of West Java citizen in the *PROLEGNAS*; 3) the factor that support and obstruct *DPD* role in conveying the aspiration of West Java citizen in the *PROLEGNAS*. The research is conducted as an effort in knowing the role of *DPD* in *PROLEGNAS* through conveying the citizen aspiration activity. The approach in the research is qualitative approach purposed to understand and depict a phenomenon. The data is derived through interview, observation, and documentation study. The result show that: 1) there are four efforts by *DPD* in absorbing the aspiration of West Java citizen; 2) the outcome that is obtained by *DPD* in conveying the aspiration of West Java citizen has not been optimum and no law product is produced; and 3) the factor that support *DPD* in conveying the aspiration of West Java citizen in *PROLEGNAS* is the citizen itself, while the obstacles are the limitation of *DPD* power, less of *DPD* the leader role, and the *DPD* position that is only being the second party in legislation after DPR.

Keywords: *the Regional Council of Representative, National Legislation Program, and conveying the aspiration activity.*